

**KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI RESIKO
BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Studi Kesiapsiagaan Terhadap Resiko Bencana)**

Zikri Alhadi & Siska Sasmita

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Email: the_zikral@yahoo.co.id, sis_4150@yahoo.com

Abstract

This article aims to describe the research findings about the local community disaster preparedness based on local values in facing the risk of earthquake and tsunami. The authors describe the disaster preparedness of a community with high level of homogeneity, since the activity of disaster preparedness for highly homogenic community is very crucial due to the high population. Beside that, intervention in highly homogenic community is relatively easier in short term because of their uniformed background. The authors also identify the community's values that can be used as a basis in strengthening community preparedness. Local values include the following: strengthening the role of 'niniak mamak', increasing the attendance in the mosque, prayer and 'ciloteh Lapau' (conversations in stalls). The result of this study is expected to become the basis for stakeholders in the city of Padang in formulating comprehensive disaster management policies, particularly pre-disaster management.

Keywords: *disaster, risk preparedness, local values*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian yang berupa kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana gempa dan tsunami berbasis kearifan lokal di Kota Padang. Penulis menggambarkan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktivitas kesiapsiagaan untuk masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi sangat krusial karena populasi mereka yang besar. Disamping itu intervensi terhadap masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi relatif mudah dilakukan dalam jangka pendek karena keseragaman latar belakang yang mereka miliki. Pada artikel ini penulis juga mengidentifikasi nilai – nilai lokal yang telah ada di tengah-tengah masyarakat dan bisa dijadikan landasan dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Nilai-nilai lokal tersebut diantaranya adalah: penguatan peranan niniak mamak, kembali ke surau, doa tolak bala dan ciloteh lapau. Diharapkan hasil studi dari penelitian ini bisa menjadi wacana bagi pemangku kepentingan terkait di Kota Padang dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif terutama pada tahap pra – bencana.

Kata kunci: *Kesiapsiagaan, Kearifan Lokal, Bencana*

Pendahuluan

Kota Padang termasuk salah satu daerah di dunia yang paling berisiko bila diterjang tsunami. Tanpa peringatan dini dan persiapan evakuasi, diperkirakan 60 persen penduduk dapat menjadi korban. Kepadatan penduduk Padang saat ini di atas 141.000 jiwa per kilometer persegi dari total penduduk 900.000 jiwa yang kebanyakan berdomisili di tepi

pantai. Padang dan sekitarnya yang berada pada kerendahan dengan penduduk hampir satu juta jiwa, bila diterjang oleh gelombang tsunami dengan ketinggian 5-8 meter akan menelan banyak korban, apalagi di daerah tersebut untuk penyelamatan diri sangat sulit. Selain itu berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Kota Padang, dataran rendah yang ada di Padang lebih dari 50 persen dari total hampir 700 Km²

luas keseluruhan kota Padang Untuk diperlukan suatu strategi penanggulangan bencana yang komprehensif untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman gempa dan tsunami yang tidak bisa diprediksi secara akurat waktu datangnya.

Untuk mengikat komitmen antar elemen masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami diperlukan upaya menyatukan persepsi pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuda serta niniak mamak setempat. Selama ini upaya peningkatan kesiapsiagaan cenderung didominasi dari inisiatif lembaga swadaya masyarakat dengan mengajak serta masyarakat. Untuk mengikat komitmen ini diperlukan inisiatif dari para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal yang telah ada di tengah-tengah masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mendorong baik *stakeholders* penanggulangan bencana terkait maupun masyarakat di Kota Padang untuk lebih sadar pentingnya upaya meningkatkan dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Artikel ini akan menjembatani antara kondisi faktual yang ada di Kota Padang terkait dengan kerentanan terhadap bencana dan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan apa yang dibutuhkan oleh Kota Padang dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami berdasarkan nilai-nilai lokal.

Kajian Pustaka

a. Pengertian Kesiapsiagaan

Dari pengalaman dalam menangani berbagai kejadian bencana di berbagai belahan bumi ini, dalam 20 tahun terakhir ini telah dirasakan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, bukan saja pada tingkat pemerintahan dari suatu negara atau suatu daerah, tetapi juga pada tingkatan komunitas yang langsung merasakan dan harus menghadapi bencana itu sendiri, terutama sebelum bantuan atau pertolongan datang dari instansi atau badan-badan pertolongan atau penanganan bencana yang resmi. Pengertian komunitas dapat didekati dengan definisi dari McMillan & Chavis sebagai berikut: "*community is defined as a feeling that members have a belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, and a shared faith that members*"

need will be met through their commitment to be together"(LIPI, 2006:1)

Pada realitasnya, di masyarakat masih banyak terdapat berbagai penafsiran yang berbeda terhadap konsep kesiapsiagaan. Dalam kajian untuk pengembangan kerangka penilaian kesiapsiagaan masyarakat ini, telah digunakan suatu konsep atau pengertian dari Nick Carter dalam LIPI/ISDR (2006:1), mengenai kesiapsiagaan dari suatu pemerintahan, suatu kelompok masyarakat atau individu, sebagai berikut: "tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.

Sementara itu, Sutton mengatakan bahwa konsep dari kesiapsiagaan sendiri adalah "*The concept of disaster preparedness encompasses measures aimed at enhancing life safety when a disaster occurs, such as protective actions during an earthquake, hazardous materials spill, or terrorist attack. It also includes actions designed to enhance the ability to undertake emergency actions in order to protect property and contain disaster damage and disruption, as well as the ability to engage in post-disaster restoration and early recovery activities*" (Sutton, 2006: 3). Sutton juga menambahkan bahwa kesiapsiagaan itu adalah "*commonly viewed as consisting of activities aimed at improving response activities and coping capabilities. However, emphasis is increasingly being placed on recovery preparedness, that is, on planning not only in order to respond effectively during and immediately after disasters but also in order to successfully navigate challenges associated with short- and longer-term recovery*"(Sutton, 2006: 3).

Sedangkan dimensi dan aktifitas kesiapsiagaan sendiri menurut Sutton seperti tabel 1. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan pada kajian kerangka penilaian kesiapsiagaan masyarakat disini lebih ditekankan pada menyiapkan kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan tanggap darurat secara cepat dan tepat. Kegiatan tanggap darurat meliputi langkah-langkah tindakan sesaat sebelum bencana, seperti: peringatan dini (bila memungkinkan) meliputi penyampaian peringatan dan tanggapan terhadap peringatan; tindakan saat

Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang ...

kejadian bencana, seperti: melindungi/menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis benda berharga, tindakan evakuasi, dan tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadi bencana, seperti: SAR, evakuasi, penyediaan tempat berlindung sementara, perawatan darurat, dapur umum, bantuan darurat, survei untuk mengkaji kerusakan dan kebutuhan-kebutuhan darurat serta perencanaan untuk pemulihan segera (infrastruktur kritis, sarana sosial, seperti: pendidikan dan ibadah). Selain itu juga dijelaskan elemen-elemen dalam kesiapsiagaan.

Terkait masalah kesiapsiagaan masyarakat, beberapa sumber mengatakan bahwa untuk menciptakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, terdiri dari beberapa faktor kritis, diantaranya:

1. pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana
2. kebijakan dan panduan
3. rencana untuk keadaan darurat bencana
4. sistim peringatan bencana
5. kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. (LIPI, 2006:3)

Tabel 1. Dimensi Kesiapsiagaan

<i>Dimension</i>		<i>Activities</i>
<i>Hazard Knowledge</i>		<i>Conducting hazard, impact, and vulnerability assessments, Using loss estimation software, scenarios, census data; Understanding potential impacts on facilities, structures, infrastructure, populations; Providing hazard information to diverse stakeholders</i>
<i>Management, Coordination</i>	<i>Direction and</i>	<i>Assigning responsibilities; Developing a division of labor and a common vision of response-related roles and responsibilities; Forming preparedness committees, networks; Adopting required and recommended management procedures (e.g., National Incident Management System). Providing training experiences, conducting drills, educating the public</i>
<i>Formal and Informal Response Plans and Agreement</i>		<i>Developing disaster plans, evacuation plans, memoranda of understanding, mutual aid agreements, collaborative partnerships, resourcesharing agreements; Participating in broader and more general planning arrangements (e.g., neighborhood and community preparedness groups, Urban Area Security Initiative regional plans, industry-wide preparedness initiatives)</i>
<i>Supportive Resources</i>		<i>Acquiring equipment and supplies to support response activities; Ensuring coping capacity, Recruiting staff; Identifying previously unrecognized resources; Developing logistics capabilities</i>
<i>Life Safety Protection</i>		<i>Preparing family members, employees, others to take immediate action to prevent death and injury, e.g., through evacuating, sheltering in place, using "safe spaces" within structures, taking emergency actions to lessen disaster impacts on health and safety; Containing secondary threats, e.g. fire following earthquakes</i>
<i>Property Protection</i>		<i>Acting expediently to prevent loss or damage of property; protecting inventories, securing critical records; Ensuring that critical functions can be maintained during disaster; Containing secondary threats</i>
<i>Emergency Coping and Restoration of Key Function</i>		<i>Developing the capacity to improvise and innovate Developing the ability to be self-sustaining during disasters; Ensuring the capacity to undertake emergency restoration and early recovery measures</i>
<i>Initiation of Recovery</i>		<i>Preparing recovery plans; developing ordinances and other legal measures to be put into place following disasters; Acquiring adequate insurance; Identifying sources of recovery aid</i>

Sumber: Jeanet Sutton, *Disaster Preparedness*, University of Colorado, 2006, 6

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengkategorikan masyarakat/komunitas yang bermukim di sepanjang pesisir Pantai Barat Kota Padang menjadi berdasarkan lokasi penelitian, yaitu:

a. Masyarakat Pesisir Pantai Bungus

1) Penguatan kapasitas komunitas

Asumsi keliru yang dipahami sebagian masyarakat pesisir Pantai Bungus Teluk Kabung berimplikasi pada cara pandang dan sikap mereka dalam menghadapi bencana tsunami yang diprediksi melanda Kota Padang. Kondisi geografis Pantai Bungus yang menjorok ke daratan (teluk) diperkirakan oleh sebagian masyarakat sebagai posisi yang relatif aman terhadap terjangan gelombang jikalau tsunami terjadi. Hal ini berbeda dengan pendapat ilmuwan Earth Observatory of Singapore, Jamie Mc.Coughey yang peneliti wawancarai pada tanggal 19 September 2012. Sembari menunjukkan simulasi tsunami untuk kawasan Bungus dan Teluk Bayur, Jamie menyatakan bahwa terjangan gelombang tsunami berpotensi dirasakan sangat kuat di pesisir Pantai Bungus dibanding kawasan lain di pesisir Pantai Barat Kota Padang.

Asumsi yang keliru ini tampaknya menjadi pegangan bagi masyarakat setempat untuk tidak mewaspadai resiko dan kerentanan di lingkungan mereka. Hingga wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2012, masih ada sebagian masyarakat yang enggan terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan. Menurut pengakuan salah seorang informan yang gencar mem-persuasi komunitas untuk melakukan aktivitas kesiagaan secara mandiri, persiapan yang diri dan keluarganya lakukan sering menuai tertawaan dari orang-orang di sekeliling mereka. Sebagian masyarakat tetap saja meyakini bahwa gelombang tsunami tidak akan melewati teluk dimana mereka bermukim, oleh karenanya upaya kesiapsiagaan tidak dibutuhkan. Sebagai pendatang yang baru bermukim sekitar lima tahun di Bungus, sang informan tak bisa bertindak banyak karena penduduk asli mengklaim lebih memahami kondisi geografis dan alamiah Pantai Bungus.

Berdasarkan adat istiadat setempat, masyarakat setiap tahunnya melakukan semacam budaya tolak bala yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama. Meskipun budaya tolak bala ini diyakini sebagai salah satu upaya untuk memohon pada Yang Kuasa agar bencana

tsunami tidak terjadi dan menimpa daerah mereka, namun peneliti mengidentifikasi bahwa budaya tolak bala sebenarnya lebih identik dengan pengharapan akan hasil laut yang baik dan agar bencana tak menimpa para nelayan yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya dari hasil laut.

Bagi para pemuka agama, langkah terbaik untuk mengantisipasi bencana agar tidak melanda diri dan lingkungannya adalah dengan menutup tempat-tempat maksiat yang beberapa tahun belakangan marak di sekitar Bungus. Sekelompok warga yang kadangkala dibekingi oknum aparat mengoperasikan sejumlah warung remang-remang di sekitar Bungus yakni di lokasi yang bernama Bukit Lampu. Lokasi ini ramai dikunjungi terutama malam hari oleh pasangan-pasangan yang melakukan tindakan asusila. Tindakan ini melanggar syariat Islam yang sebenarnya menjadi pegangan bagi mayoritas muslim setempat. Jika hal ini dibiarkan maka pelanggaran norma agama diyakini akan menimbulkan murka Tuhan yang termanifestasi dalam beragam bentuk bencana.

2) Respon pemerintah kota terhadap potensi bencana

Peneliti tidak berhasil mengidentifikasi upaya kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas komunitas yang dilakukan oleh Pemko Padang. Dari beberapa pengalaman yang ada, kekosongan peran pemerintah daerah dalam berbagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat lokal diakui dengan mengemukakan alasan ketiadaan peruntukkan dalam pos anggaran. Jika permintaan diusung secara *bottom-up* oleh komunitas setempat maka artinya semua pendanaan menjadi tanggung jawab masyarakat yang notabene berasal dari kelas menengah ke bawah. Ketika pemerintah kota cenderung abai terhadap perlindungan keselamatan warga atas resiko bencana yang mungkin terjadi, beberapa institusi lain yang berlokasi di Bungus memberikan perhatian cukup baik saat potensi bencana mengancam warga. Peristiwa gempa 30 Agustus 2009 dan beberapa gempa yang melanda Kota Padang sesudahnya memperlihatkan kepedulian institusi seperti Markas Polisi Air yang mengaktifkan sirine sebagai pertanda bagi warga untuk melakukan evakuasi. Tak hanya sampai disitu, menurut keterangan informan, Polair juga mempersilahkan warga memanfaatkan lokasi di dekat markas mereka sebagai sarana evakuasi horizontal karena letak markas yang

relatif lebih tinggi dan lebih cepat dijangkau oleh warga yang sedang beraktivitas di dekat pantai.

3) Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan kapasitas komunitas

Alam sepertinya menyajikan bukti tersendiri yang memberi penyadaran bagi masyarakat Pesisir Pantai Bungus. Tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai pada Oktober 2010 menggugah kesadaran sedikit orang yang kemudian memulai aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan secara mandiri di lingkungan keluarga dan rukun tetangga. Meskipun upaya penguatan kapasitas yang dilakukan secara mandiri oleh komunitas tidak mendapat dukungan dari otoritas formal lokal, namun lembaga donor internasional (Mer-C Corps) memberi bantuan dalam bentuk penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana tsunami. Rencana kesiapsiagaan tersebut adalah dalam bentuk penyuluhan kepada warga dan pendirian rambu-rambu penunjuk arah evakuasi. Hingga penelitian ini berjalan, rambu-rambu penanda arah evakuasi yang difasilitasi oleh Mer-C Corps masih terpasang baik dan dirasakan manfaatnya oleh warga meskipun ketika gempa terjadi ada sebagian warga yang memilih rute evakuasi tersendiri tanpa mengacu pada lokasi yang telah disepakati sebelumnya.

b. Masyarakat Pesisir Pantai Aie Manih

1) Penguatan kapasitas komunitas

Dibandingkan komunitas pesisir Pantai Purus dan komunitas Pesisir Pantai Bungus, komunitas warga di pesisir Pantai Aie Manih tergolong lebih menyadari resiko bencana yang menghadang diri dan lingkungan mereka. Meskipun keterlibatan Pemerintah Kota dalam penguatan kapasitas sama minimnya dengan lokasi-lokasi lain di pesisir Pantai barat Kota Padang, namun pemahaman warga setempat terhadap kerentanan membuat mereka mulai menggagas aktivitas-aktivitas mandiri yang progresif.

Tahap penyadaran dimulai dari inisiasi yang dilakukan oleh pihak eksternal yakni LSM (MER-C Corps dan Jemari). Sambutan masyarakat terhadap upaya *knowledge-sharing* yang dilakukan LSM sangat positif ditandai dengan kemandirian komunitas menindaklanjuti tahap inisiasi. Setelah serangkaian aktivitas LSM yakni seminar, workshop hingga pembangunan komponen fisik pendukung evakuasi seperti penunjuk arah hingga sarana penam-

pungan dan penyaluran air bersih selesai dilaksanakan, komunitas melanjutkan melalui pembangunan shelter yang dananya berasal dari kontribusi komunitas dan CSR beberapa perusahaan di Kota Padang.

Upaya membangun kesadaran dan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh LSM melibatkan hampir semua komponen masyarakat mulai dari komponen agama, adat, hingga kaum perempuan. Akan tetapi keterlibatan komponen adat dan agama yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai masih bersifat pasif, artinya keikutsertaan mereka masih sebatas undangan LSM. Kaum perempuan justru memiliki kontribusi aktif dalam mempromosikan kesiapsiagaan mulai dari level rumah tangga hingga level kota dan propinsi. Kaum perempuan ini juga terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan yang membutuhkan pengorbanan fisik seperti simulasi dan pengecekan sarana pendukung evakuasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam upaya kesiapsiagaan bencana tsunami di Kota Padang bukan sekedar *supporting system* namun sebagai salah satu dari komponen utama.

Keberadaan niniak mamak dan alim ulama lebih banyak terlihat dalam aktivitas budaya seperti doa tolak bala yang diadakan setiap bulan Sya'ban pada penanggalan Hijriyah. Serupa dengan doa tolak bala yang dilangsungkan oleh masyarakat Pesisir Pantai Bungus, masyarakat Pantai Aie Manih sepertinya tidak menjadikan doa tolak bala sebagai sarana khusus untuk memohon keselamatan dari bencana tsunami. Doa tolak bala telah berlangsung selama berpuluh tahun dan diwariskan secara turun-temurun dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tidak berkorelasi langsung dengan sejarah tsunami yang pernah melanda Padang ratusan tahun lalu. Masyarakat pesisir Pantai Aie Manih ternyata tak hanya mengikutsertakan orang dewasa dalam aktivitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Anak usia sekolah juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti simulasi yang dilakukan LSM dan pembentukan pemahaman di sekolah-sekolah dan surau-surau meskipun kegiatan ini sifatnya temporer dan insidental.

2) Respon pemerintah kota terhadap potensi bencana

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa masyarakat Pantai

Aie Manih, keterlibatan Pemerintah Kota Padang terutama Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam aktivitas pra-bencana di wilayah mereka bisa dikategorikan nihil. Meskipun Pantai Aie Manih berada dalam zona merah namun belum terlihat peran aktif Pemko dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk menghadapi bencana tsunami. Meskipun Pemerintah Kota Padang secara formal tidak memberikan perhatian memadai, namun secara personal Lurah Aie Manih yang baru bertugas sekitar satu tahun di daerah tersebut senantiasa mendukung bahkan menggerakkan masyarakatnya untuk proaktif pada program mitigasi dan kesiagaan bencana. Program terkini yang sedang digagas masyarakat adalah pembuatan shelter sebagai sarana evakuasi vertikal. Lurah memfasilitasi masyarakat untuk membangun jaringan kerja dengan institusi lain yang menjadi donatur pembangunan shelter.

3) Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan kapasitas komunitas

Kekosongan peran pemerintah Kota Padang dalam membangun kesiapsiagaan bagi masyarakat ternyata lebih banyak diisi oleh LSM terutama yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana fisik. Pendekatan informal yang dilakukan oleh LSM serta dukungan dana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung lancarnya interaksi kedua belah pihak yang bermuara pada kesinambungan kegiatan prabencana. Selain intervensi LSM, dukungan positif juga teridentifikasi dari lembaga lainnya yakni RAPI (Radio Antar penduduk Indonesia) dalam bentuk fasilitas diseminasi peringatan dini tsunami. RAPI menyediakan rabab yang dapat menyiarkan pesan peringatan dini dari BPBD Kota Padang tentang potensi tsunami yang melanda wilayah pesisir pantai. Rabab dapat dioperasikan ketika listrik padam sehingga akses masyarakat rentan terhadap informasi penting tidak terkendala.

c. Komunitas Pedagang Purus

Pantai Purus merupakan objek wisata yang cukup digandrungi di Kota Padang. Pantai ini senantiasa ramai oleh pengunjung terutama pada sore hingga malam hari. Para pengunjung mayoritas kaum muda, dan pada waktu-waktu tertentu rombongan keluarga datang bertamasya atau menikmati beragam kuliner yang disajikan pedagang di sepanjang tepi pantai. Para

pedagang yang beraktivitas di Pantai Purus berasal dari hampir semua strata usia dan sosial ekonomi. Ada anak-anak usia sekolah yang turut membantu orangtua mencari nafkah, para pemuda yang bekerja di tenda warna-warni yang menyediakan beragam hidangan, hingga penduduk berusia 40 tahun ke atas yang berprofesi sebagai pedagang hasil laut atau pemilik rumah makan. Sebagian pedagang adalah pemodal besar meski tak dipungkiri banyak juga yang bermodal kecil.

Komunitas pedagang Pantai Purus Kota Padang merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap potensi bencana tsunami yang timbul di sepanjang Pantai Barat Sumatera karena aktivitas ekonomi yang mereka lakukan hanya berjarak sekitar 5 hingga 10 meter dari bibir pantai. Kontrasnya, kerentanan ini tidak membuat komunitas pedagang gentar atau berupaya untuk memindahkan aktivitas ekonomi mereka ke lokasi lain yang lebih aman. Peristiwa gempa Padang September 2009 dan gempa Aceh April 2012 menjadi gambaran betapa komunitas pedagang memilih bertahan di sepanjang pesisir Pantai Purus karena alasan keberlanjutan kelangsungan hidup keluarga.

1) Kesadaran tentang dan penilaian resiko bencana

Komunitas pedagang di sepanjang Pantai Purus mengetahui potensi tsunami yang mungkin melanda diri dan lingkungannya, meskipun informasi tersebut belum diikuti dengan kesadaran untuk mengurangi resiko yang timbul akibat gempa dan tsunami. Secara umum para pedagang tidak dibekali dengan pengetahuan memadai tentang karakter geografis lingkungan tempat mereka beraktivitas, resiko bencana yang menghadang, dan tingkat kerentanan komunitas terhadap bencana. Informasi mengenai potensi tsunami yang terjadi setelah sebuah gempa besar melanda rerata didapatkan pedagang secara informal, misalnya melalui pembicaraan dari mulut ke mulut yang berkembang di lingkungan sekitar. Sementara itu informasi yang tersaji melalui surat kabar maupun siaran televisi atau radio cenderung tidak lengkap dan tidak bisa dikonsumsi secara kontinu oleh pedagang karena tingkat kesibukan mereka yang cukup tinggi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa para pedagang cenderung bereaksi pasif terhadap potensi bahaya dan resiko bencana yang menghadang mereka. Pedagang mengaku tidak ada upaya kesiapsiagaan terhadap resiko

bencana yang digagas dalam komunitas mereka. Secara individual mereka juga tidak melakukan persiapan berarti untuk mengurangi kerentanan terhadap bahaya. Tenda-tenda tempat berdagang yang mereka bangun sangat terbuka dan dekat ke pantai membuktikan bahwa pedagang seolah mengabaikan potensi bencana. Pedagang juga tidak membekali diri dengan keterampilan dan peralatan siaga bencana. Mereka hanya mengetahui jalur atau tempat evakuasi yang harus dituju jika tsunami melanda.

Tidak hanya pedagang, semenjak gempa Padang 30 September 2009 hingga gempa 12 April 2012 tidak ada perubahan berarti yang terjadi berkaitan dengan upaya mitigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah Kota hanya membangun beberapa pemecah ombak di sepanjang pantai, membangun sebuah hotel dan rumah susun yang lantai atasnya sekaligus berfungsi sebagai sarana evakuasi vertikal. Pembangunan sarana fisik yang belum maksimal juga tidak dilengkapi dengan inisiasi kerentanan bencana kepada komunitas pesisir Pantai Purus. Akibatnya ketika gempa yang berpotensi tsunami terjadi, masyarakat cenderung bertindak tanpa koordinasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa relasi yang cenderung kurang harmonis antara komunitas pedagang pesisir Pantai Purus dan Pemerintah Kota Padang pada program reklamasi Pantai Padang pascagempa 2009 telah memberi imbas terhadap rasa percaya pedagang. Upaya Pemko Padang untuk merelokasi pedagang sejauh 400 meter dari bibir pantai sebagai antisipasi dampak tsunami dimaknai sebagai hal yang mengancam keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat Purus yang mayoritas bergantung penghidupannya pada sektor informal. Reklamasi pantai menurut Walikota Fauzi Bahar merupakan skenario mitigasi yang paling mungkin dilakukan di Pantai Padang dibanding peninggian rumah warga, menjauhkan rumah warga dari pantai, pembangunan *seawall* (dinding laut), dan penanaman bakau.

2) Penguatan kapasitas komunitas

Tidak ada upaya mitigasi bencana yang teridentifikasi dilakukan secara swadaya dan swakarsa oleh komunitas pedagang di pesisir pantai purus. Secara fisik tidak ada infrastruktur mitigasi yang dapat mereduksi pengunjung dan pedagang terhadap potensi tsunami yang terjadi setelah sebuah gempa besar mengguncang. Pedagang juga tidak melakukan upaya

pemberdayaan baik secara individu atau kelompok untuk mengurangi resiko bencana yang melanda. Berdasarkan pengakuan pedagang yang diwawancara pada tanggal 5 Juli 2012, Pemerintah Kota Padang dengan bantuan sebuah LSM yang bergerak di bidang kesiapsiagaan tsunami hanya melakukan satu kali upaya simulasi gempa dan tsunami. Dalam simulasi ini, pedagang diarahkan untuk melakukan evakuasi vertikal menghindari tsunami. Namun setelah itu tidak ada upaya lanjutan yang dilakukan pemerintah kota untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat Pantai Purus terhadap bencana.

Minimnya pengetahuan yang dimiliki komunitas pedagang pesisir Pantai Purus terhadap potensi gempa bumi dan tsunami yang rentan melanda diri dan lingkungannya membuat mereka menginterpretasi sendiri kondisi kebencanaan yang terjadi untuk kemudian menggagas upaya penyelamatan diri secara swadaya. Sebagian pedagang cenderung menutup warung/tempat usahanya ketika sebuah gempa besar mengguncang. Untuk seterusnya kelompok pedagang yang serta merta mengungsi jika sebuah gempa besar mengguncang akan peneliti labeli sebagai kelompok pertama. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari para pedagang usia muda (20 hingga 30 tahun) yang cenderung tidak terpengaruh oleh bencana lanjutan yang potensial terjadi.

Secara umum para pedagang kelompok pertama ini terdiri dari kaum wanita. Kekhawatiran terhadap keselamatan harta dan nyawa membuat mereka bergegas mengungsi ke area yang dianggap aman yakni Kompleks Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat yang berjarak sekitar satu kilometer dari garis pantai. Biasanya mereka mengungsi dengan berjalan kaki karena lokasi evakuasi tidak dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor sebagai akibat dari kepadatan lalu lintas pascagempa. Mengacu pada peta evakuasi tsunami Kota Padang, lokasi evakuasi yang dituju oleh para pedagang ini pada dasarnya masih termasuk dalam zona merah atau zona bahaya tsunami. Akan tetapi hanya lokasi inilah yang memungkinkan untuk dicapai dengan waktu relatif singkat (30 menit) sesuai dengan SOP gempa yang telah disosialisasikan.

Kelompok pedagang kedua yang terdiri dari pedagang usia muda memang menutup tempat usahanya. Namun berbeda dengan kelompok pertama yang bergegas melakukan

evakuasi, kelompok kedua akan memantau fenomena alam pascagempa sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan evakuasi. Jika gempa yang terjadi tidak diikuti dengan surutnya air laut maka para pedagang ini cenderung bertahan di sekitar tempat usaha mereka. Sebaliknya jika gempa diikuti dengan peristiwa surutnya air laut maka mereka akan melakukan tindakan evakuasi menggunakan kendaraan bermotor.

3) Respon Pemerintah Kota terhadap potensi bencana

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh gambaran belum maksimalnya respon pemerintah daerah, mulai dari tataran terkecil di tingkat kelurahan hingga kota, terdapat upaya kesiapsiagaan terhadap resiko bencana. Secara fisik, pemerintah kota belum menyediakan sarana yang mampu mengurangi interaksi masyarakat pesisir Pantai Purus dengan lepas pantai, misalnya dalam bentuk batu *grid* ataupun *seawall* sebagai penahan ombak. Masyarakat pesisir melakukan kegiatan ekonomi produktif hanya berjarak lima meter dari bibir pantai. Tempat tinggal masyarakatpun berjarak kurang dari 500 meter dari pantai. Kondisi ini sangat riskan bagi keselamatan masyarakat pesisir karena terjadinya gempa yang berpotensi tsunami tidaklah dapat diprediksi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemerintah Kota Padang pascagempa 2009 juga aktif menggalakkan sektor bisnis skala menengah dan besar di sepanjang pesisir Pantai Purus. Akan tetapi Pemerintah Kota tidak mengiringi kebijakan investasi yang ada dengan upaya kesiapsiagaan terhadap resiko bencana gempa dan tsunami. Upaya Pemko dalam menggalakkan kesiapsiagaan bisa dianggap minim dan bahkan bisa dikatakan bahwa simulasi dan pelatihan kepada masyarakat lebih banyak dikelola oleh LSM ataupun Pemerintah Propinsi lewat BPBD dan Pusdalops, serta Pemerintah Pusat melalui BNPB.

4) Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan kapasitas masyarakat

Pemerintah Kota memang memiliki beberapa partner baik dari lembaga internasional, LSM lokal, dan lembaga kebencanaan nasional dalam melakukan upaya kesiapsiagaan terhadap resiko bencana. Akan tetapi upaya kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana di pesisir Pantai Purus berada di tangan

masyarakat itu sendiri. Masyarakat sesungguhnya menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap hidup dan penghidupan mereka. Ketika pemerintah kota tidak mampu memberikan jawaban atas kesulitan mata pencaharian yang mereka alami maka mereka berwirausaha di sepanjang pesisir Pantai. Dan jika masyarakat harus berhadapan dengan potensi tsunami yang setiap saat dapat menghadang mereka, maka merekaapun harus menyelamatkan diri dan usaha mereka atas inisiatif sendiri.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemko sepertinya menjadi penghalang interaksi diantara kedua belah pihak dalam berbagai program pembangunan, termasuk upaya penguatan kapasitas komunitas. Sementara itu karakter masyarakat pesisir pantai yang cenderung keras ditengarai menjadi salah satu kendala komunikasi antara masyarakat dengan *stakeholder* lainnya di pesisir pantai Purus. Alhasil Pemko dan partner lainnya mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan program-programnya. Padahal menurut masyarakat Pantai Purus, mereka sangat butuh akan pengetahuan dan pelatihan seputar gempa dan tsunami, namun Pemko dan lembaga lainnya cenderung pasif.

Masyarakat pesisir pantai Purus telah turun-temurun mendiami lokasi mereka bermukim dan beraktivitas sekarang. Fakta bahwa gempa besar yang sering melanda Kota Padang akan berpotensi pada timbulnya tsunami yang notabene membahayakan keselamatan tidak serta merta membuat mereka melakukan eksodus. Masyarakat pesisir pantai Purus adalah tipikal manusia ekonomi (*economic man*) yang berpikir rasional bahwa untuk bertahan hidup mereka haruslah berusaha dengan jalan apapun, meski usaha tersebut berarti menantang keselamatan jiwa. Ketiadaan pilihan pekerjaan dan ketidakmampuan pemerintah menyediakan standar kehidupan yang layak warganya membuat pedagang pantai Purus rela berjualan dari pagi hingga malam meski kadang harus melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Padang. Bagi sebagian pedagang, meminta mereka untuk pindah dari pesisir pantai dengan alasan potensi bencana tsunami adalah akal-akalan untuk menjauhkan mereka dari sumber mata pencahariannya. Lalu mengapa Pemko tidak melakukan tindakan serupa terhadap para pemodal besar yang saat ini juga marak membuka usaha di sepanjang pantai barat Kota Padang.

Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang ...

Saling curiga antara Pemko dan masyarakat yang bermukim di sepanjang pesisir pantai Purus berimplikasi buruk bagi program kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Program yang ada dikhawatirkan oleh masyarakat sebagai cara baru untuk menakut-nakuti mereka dan membuat mereka meninggalkan tanah yang telah lama mereka diami. Sementara Pemko mencurigai bahwa pedagang pesisir Pantai Purus mengakomodasi terjadinya tindak maksiat yang berimplikasi pada terjadinya bencana di Kota Padang.

Kategorisasi yang peneliti susun tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakkan atau mengelompokkan komunitas secara vertikal. Masing-masing komunitas menduduki posisi horizontal yang sama dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Akan tetapi untuk menghasilkan rancangan model yang sempurna, pengenalan terhadap kondisi riil komunitas sangat diperlukan. Komunitas dengan latar belakang yang berbeda, dalam hemat penulis, harus mendapatkan perlakuan (*treatment*) penguatan yang berbeda pula. Oleh sebab itu kategorisasi komunitas menjadi acuan utama dalam mendesain model kesiapsiagaan komunitas berbasis kearifan lokal.

Untuk menggali kearifan lokal yang ada di masyarakat, peneliti telah melakukan penggalan data dan informasi di berbagai lokasi di Kota Padang diantaranya: Kelurahan Aie Manis, Kelurahan Pasie Nan Tigo dan kawasan Pondok Kota Padang. Dengan memawancarai masyarakat di sekitar lokasi, peneliti menemukan beberapa kearifan lokal yang selama ini telah digunakan secara turun temurun seperti: *memperkuat peranan niniak mamak, kembali kesurau, doa tolak bala, dan ciloteh lapau*. Kearifan lokal ini memang secara spesifik tidak berkaitan dengan penanganan bencana, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk lebih mengoptimalkan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kearifan lokal tersebut adalah:

Penguatan Peran Niniak Mamak

Seiring dengan bergemanya semangat kembali ke nagari, maka penguatan peran niniak mamak sebagai pihak yang bertanggung-jawab terhadap anggota suku perlu dilakukan. Dalam kultur Minangkabau, konsep keluarga tidak terbatas pada keluarga inti (*nuclear family*) namun lebih kepada keluarga luas (*extended family*). Oleh karenanya relasi

mamak dan kamanakan harus berlaku fungsional. Konsep adat yang mengatakan *tando badunsanak mamaga dunsanak, tando bakampuang mamaga kampuang, tando banagari mamaga nagari*, dapat dijadikan acuan dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Untuk itu niniak mamak dilibatkan dalam setiap tahapan perumusan sampai implementasi program penanggulangan bencana gempa dan tsunami. Diharapkan dengan keterlibatan niniak mamak, segala bentuk program akan mudah diimplementasikan di tataran masyarakat. Misalnya saja dalam edukasi masyarakat, yang selama ini lebih banyak dilakukan kalangan organisasi non pemerintah, bisa melibatkan secara formal kalangan niniak mamak untuk ikut serta dalam memberikan edukasi kepada anak kemenakannya karena interaksi antara niniakmamak dengan anak kemenakannya lebih intensif dilakukan.

Di daerah yang dijadikan studi kasus, di Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Bungus Barat, peranan niniak mamak belum begitu dirasakan. Padahal daerah dengan tingkat homogenitas masyarakat yang tinggi biasanya peranan niniak mamak cukup berperan dalam kehidupan sehari-hari, karena umumnya di daerah tersebut masyarakatnya rata-rata mempunyai hubungan kekeluargaan. Pada dua daerah yang tingkat homogenitas sosialnya tinggi, yaitu Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Bungus Barat, peranan Niniak Mamak masih minim. Menurut pemaparan warga yang tergabung dalam Kelompok Siaga Bencana (KSB) di masing-masing kelurahan, kalangan niniak mamak belum banyak dilibatkan dalam penanggulangan bencana, baik pra, saat dan pasca bencana. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal, peranan niniak mamak disentralkan. Niniak mamak bahkan menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap kegiatan, misalnya edukasi masyarakat, penetapan jalur dan lokasi evakuasi, mekanisme sistem peringatan dini tsunami, kalangan niniak mamak harus memberi kontribusi secara optimal karena merekalah yang paling mengetahui bagaimana kondisi daerah masing – masing terutama.

Niniak mamak tidak hanya sekedar menanamkan nilai-nilai keluhuran agama dan budi pekerti saat '*manyilau*' kemenakan, namun juga mengintroduksi nilai-nilai kesiapsiagaan bencana ketika berinteraksi dengan kemenakan serta anggota sukunya. Dalam masyarakat

Minangkabau di perkotaan fungsi ini relatif telah diambil alih oleh ayah sebagai kepala keluarga. Kondisi ini bukan menjadi halangan bagi mamak untuk menjalankan fungsi *batang baringin di tengah padang*. Mamak justru dapat merangkul ayah selaku sumando mamak rumah yang memainkan lebih besar untuk kepentingan suku dan nagari (Sjafri Sairin, 2007:28). Berbedanya kebiasaan antarsuku dan pola pendekatan yang digunakan mamak selaku pimpinan suku tentu akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam upaya kesiapsiagaan terhadap resiko bencana. Hal ini memiliki efek positif karena memudahkan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan karena dibangun berdasarkan karakteristik masing-masing suku. Oleh karena itu dalam setiap aktivitas sosialisasi kebencanaan niniak mamak dari berbagai suku harus mendapat prioritas utama karena mereka lah yang diharapkan menjadi jembatan pemerintah daerah/LSM dalam mengenalkan aktivitas kesiapsiagaan kepada komunitas kultural.

Dalam mengangkat peranan niniak mamak sebagai subjek untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat tentu dibutuhkan upaya yang komprehensif dan sinergi antar pemangku kepentingan. Memperkuat peranan niniak mamak berarti menggunakan pendekatan kultural yang mengangkat kearifan lokal sebagai metoda untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana. Niniak mamak mempunyai peranan yang sangat sentral dalam tatananan adat minang dimana niniak mamak selain mengayomi anak-anaknya sendiri tetapi juga mengayomi para kemenakannya. Ini sesuai dengan filosofi minang, "*anak dipangku kamanakan dibimbiang*". Kuatnya peranan niniak mamak ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat upaya kesiapsiagaan terhadap resiko bencana yang salah satunya dalam bentuk edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan kebencanaan dan upaya penyelamatan diri terutama menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami.

Kembali ke Surau

Generasi muda Minangkabau, khususnya yang lahir sejak masa Orde Baru, sepertinya tidak lagi mengenal surau dalam arti tersiratnya. Surau secara harfiah dikenali sebagai tempat beribadah. Fungsi sesungguhnya surau yang lebih dari institusi pendidikan keagamaan karena mencakup pula sebagai institusi adat dan

budaya, telah teredam dari nomenklatur kontemporer kelembagaan pendidikan Islam (Azyumardi Azra, 2007:5).

Dalam rangka revitalisasi fungsi surau dalam komunitas Minangkabau maka beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. Surau kembali difungsikan sebagai pesantren bagi anak-anak usia sekolah saat bulan Ramadhan. Revitalisasi yang terbatas ini perlu diekstensikan agar suaru tak hanya sebagai wadah menuntut ilmu agama namun seiring dengan ilmu pengetahuan. Melembagakan kembali surau dengan mengintegrasikan ilmu agama, ilmu pengetahuan kontemporer dan nilai-nilai kearifan budaya menjadi target utama peneliti.

Dalam model 'kembali ke surau' nilai-nilai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan diintroduksi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan semisal didikan shubuh, wirid remaja, pesantren ramadhan, pengajian mingguan dan bulanan, serta majlis taklim. Komunitas masyarakat yang religius cenderung lebih mudah menerima nilai-nilai kesiapsiagaan jika dikombinasikan dengan pemahaman terhadap keyakinan yang mereka anut.

Dari percobaan awal yang peneliti lakukan, pengenalan nilai-nilai kesiapsiagaan melalui kegiatan pesantren ramadhan mendapat respon positif baik dari para siswa maupun penyelenggara. Pendekatan yang ditempuh dalam penyampaian nilai-nilai kesiapsiagaan di surau berbeda dengan saat di sekolah. Pendekatan yang dilakukan di Surau adalah pendekatan yang lebih berfokus kepada nilai-nilai spritual. Karena di Ranah Minangkabau sangat indetik dengan Islam, dengan filosofi yang terkenal yaitu "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" dan Surau (Masjid) merupakan sentra dakwah dan pengkajian nilai-nilai religius maka surau juga bisa dijadikan sebagai tempat edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa dan tsunami.

Doa tolak bala

Pada masyarakat yang masih memegang sebagian besar nilai-nilai tradisi Minangkabau, pelaksanaan doa tolak bala masih dilakukan secara periodik. Doa tolak bala merupakan salah satu upaya mengantisipasi musibah berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Untuk komunitas nelayan, doa tolak bala ditujukan sebagai permohonan ke-

selamatan bagi warga yang mencari penghidupan di laut.

Pelaksanaan doa tolak bala melibatkan beragam unsur meliputi alim ulama, tetua adat, aparat pemerintah tingkat kelurahan serta warga masyarakat. Biasanya doa tolak bala berisikan seremonial pemanjatan doa, pelarungan benda-benda tertentu ke laut dan diakhiri dengan acara makan bersama. Pada dasarnya doa tolak bala merupakan bagian dari aktivitas asimilasi adat dan agama. Introduksi nilai-nilai kesiapsiagaan bencana dalam doa tolak bala dapat dilakukan melalui peran serta pemuka adat, pemuka adat, dan lurah. Dalam alur seremoni doa tolak bala diselipkan petuah adat yang mengacu pada tambo/kaba seputar cara-cara kesiagaan yang ditempuh para pendahulu. Begitu juga dalam petuah agama yang mencakup ikhtiar menyelematkan diri dari ancaman bencana. Sedangkan aparat pemerintah kelurahan memegang andil dalam mensosialisasikan upaya kesiapsiagaan yang digagas oleh pemerintah daerah serta LSM.

Ciloteh lapau

Lapau atau kedai merupakan tempat yang dikunjungi hampir semua kalangan usia di Kota Padang. Untuk kaum lelaki kedai kopi merupakan tempat bersua rekan-rekan dan berbincang seputar kondisi terkini. Sedangkan kaum perempuan memiliki kecenderungan untuk berkumpul di warung-warung tradisional yang menjual kebutuhan dapur sehari-hari. Jika pengunjung kedai kopi relatif tidak terbatas waktu, maka pengunjung warung yang menjual kebutuhan dapur hanya ramai di waktu pagi hingga siang hari. Topik yang dibahas di lapau sangat tergantung pada situasi yang sedang berkembang di masyarakat. Orang pertama (*whistle blower*) yang memulai pembicaraan juga memberi andil terhadap topik serta arah pembicaraan. Topik seputar bencana dewasa ini menjadi pembahasan hangat di lapau/warung. Akan tetapi pembicaraan tersebut acap berkembang dalam koridor nonilmiah.

Sebagai upaya menanamkan kesadaran seputar kesiapsiagaan dan membentuk pola pikir ilmiah terhadap bencana maka memberikan pemahaman terhadap komunitas lapau/warung perlu dimulai dari pemilik. Pemilik warung adalah subjek utama karena ia selalu berada di tempat meskipun para pengunjung silih berganti datang. Dengan demikian pemilik warung dapat mengarahkan pembicaraan se-

putar bencana agar tetap berada dalam koridor yang benar. Dalam jangka panjang pemilik warung diharapkan berperanserta menggagas upaya kesiapsiagaan pada komunitasnya sesuai dengan potensi ancaman bencana di lingkungannya.

Menggagas strategi kesiapsiagaan bencana berbasis kearifan lokal memerlukan kepekaan untuk menangkap nilai-nilai ekstrinsik dan intrinsik yang telah berabad-abad menginternalisasi warga dalam suatu komunitas. Salah satu inti utama dalam diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah (instruksi) belaka (Isbandi Rukminto, 2008: 109). Komunitas Pasie Nan Tigo, Bungus, dan Aie Manih mungkin tidak mengkhususkan ritual adat yang mereka lakukan demi tujuan kesiagaan bencana. Ritual tersebut oleh peneliti menjadi alternatif pilihan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana.

Mengadopsi pendapat Chambers (1993) ada dua alasan utama yang mendasarinya. Pertama, yakni klaim istimewa yang dimiliki orang-orang pribui terhadap lahan/ daerah dan terhadap struktur komunitas tradisional yang berkembang selaras dengan lahan/daerah selama periode waktu yang jauh lebih lama daripada kolonisasi. Komunitas merupakan hal penting bagi kelangsungan budaya dan kehidupan spritual; dalam arti yang penting ini, kelestarian budaya tradisional merupakan kebutuhan yang lebih penting bagi orang-orang pribumi daripada orang lain kebanyakan. Alasan kedua, yaitu bahwa banyak kerugian telah dilakukan, dan dalam banyak kasus masih dilakukan, yang mengorbankan orang-orang pribumi atas nama pengembangan masyarakat (dalam Ife dan Frank Tesoriero, 2008: 453).

Simpulan

Masyarakat dengan tingkat homogenitas relatif tinggi, memiliki kecenderungan serupa atau sejenis dalam tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan ekonomi, dan tingkat afiliasi mereka dalam organisasi sosial politik. Hal ini terutama disebabkan karena latar belakang sosial budaya yang juga sama. Mereka berakar dan tumbuh dari lingkungan yang sama. Jikapun terdapat perbedaan diantara anggota komunitas maka perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Dengan demikian masyarakat tipe

ini cenderung tidak memiliki gap atau kesenjangan yang berbeda antar anggota. Sedangkan tipe masyarakat dengan homogenitas yang relatif rendah memiliki kesenjangan atau rentang sosial ekonomi yang cenderung besar diantara para anggotanya. Mereka tinggal dalam suatu lokasi yang sama namun berakar dan tumbuh dari latar belakang yang berbeda. Akibatnya mereka memiliki cara pandang dan falsafah hidup yang berbeda pula

Peranan *niniak mamak*, kembali ke surau, *doa tolak bala*, dan *ciloteh lapau* merupakan kearifan lokal yang bisa dijadikan metode dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Bentuk kearifan lokal tersebut berasal dari tradisi yang telah menjadi keseharian di ranah minangkabau pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko bencana gempa dan tsunami berbasis kearifan lokal dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan kearifan lokal ini, upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa dan tsunami akan lebih tepat sasaran karena berfokus pada nilai-nilai lokal yang telah ada selama ini di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai lokal inilah yang diharapkan bisa membuat masyarakat lokal lebih peduli terhadap pentingnya upaya pengurangan resiko bencana.

Daftar Rujukan

- Azyumardi Azra. 2007. *Dari Surau ke Sekolah dan Pesantren: Islam di Minangkabau dalam Cita dan Fakta. Minangkabau di Persimpangan Jalan*. Padang: Pusat Studi Humaniora dan Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. **Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isbandi Rukminro Adi. 2008. **Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sjafri Sairin. 2007. *Minangkabau yang Gelisah: Sebuah Catatan Singkat. Minangkabau di Persimpangan Jalan*. Padang: Pusat Studi Humaniora dan Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Sutton Jeannete. 2006. **Disaster Preparedness: Concept, Guidance, and, Research**. Boulder, University of Colorado
- TIM LIPI. 2006. **Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia**. Bandung : LIPI